

LEMBAR PENGESAHAN JOURNAL

Judul : Peran Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dalam Peningkatan Profesionalisme Guru PPKn di Kabupaten Sleman

Nama : Ismi Fatimah

NIM : 14401241059

Prodi : Pendidikan Kewarganegaraan

Reviewer


Drs. Suyato, M.Pd

NIP . 19670616 199403 1 002

Yogyakarta, 13 Juli 2018

Pembimbing


Dr. Mukhamad Murdiono, M.Pd

NIP . 19780630 200312 1 002

Rekomendasi Pembimbing : (mohon dilingkari salah satu)

- ① Dikirim ke Journal Student
2. Dikirim ke Jurnal Civics
3. Dikirim ke Jurnal lain

NB :

1. Lembar pengesahan Journal di taruh di halaman paling depan sendiri
2. Format Journal bisa di download di alamat <http://journal.student.uny.ac.id/> (Template Jurnal)

PERAN MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN (MGMP) DALAM PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU PPKN DI KABUPATEN SLEMAN

THE ROLES OF *MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN (MGMP)* IN THE IMPROVEMENT OF PROFESSIONALISM OF PPKN TEACHERS IN SLEMAN REGENCY

By. Ismi Fatimah dan Dr. Mukhamad Murdiono, M.Pd.

ismi.fatimah@student.uny.ac.id

Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta,

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran beserta upaya yang dilakukan dan kendala yang dihadapi MGMP PPKn SMP Kabupaten Sleman dalam peningkatan profesionalisme guru PPKn di Kabupaten Sleman. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian terdiri dari pengurus dan anggota MGMP PPKn SMP Kabupaten Sleman. Lokasi penelitian di lingkungan SMP negeri/swasta di wilayah Kabupaten Sleman. Teknik pengumpulan data dengan wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik *cross check*. Teknik analisis data menggunakan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran MGMP PPKn SMP Kabupaten Sleman yaitu memfasilitasi, mengkoordinasikan, dan mengakomodasi guru PPKn SMP Kabupaten Sleman dengan melakukan bimbingan teknis, seminar/*workshop*, dan studi banding dalam rangka peningkatan profesionalisme guru secara komprehensif. Kendala yang dihadapi MGMP PPKn SMP Kabupaten Sleman dalam peningkatan profesionalisme guru PPKn SMP di Kabupaten Sleman, meliputi dana operasional kegiatan dan waktu.

Kata kunci: *Peran MGMP PPKn SMP Kabupaten Sleman, Profesionalisme, Guru PPKn*

Abstract

The aim of this research was describing the roles and efforts done and the obstacles faced by MGMP PPKn SMP in Sleman regency in improving the professionalism of PPKn teachers in SMP in Sleman regency. This research was descriptive research using qualitative approach. The subjects were the board and the members of MGMP PPKn SMP in Sleman regency. The setting was in private and public SMP environment in Sleman regency. The data collection techniques were semi-structured interviews and documentation. The validity that was used was cross check. Data analysis technique used interactive model. The results of this research showed that the roles of MGMP PPKn SMP in Sleman regency were facilitating, coordinating, and accomodating PPKn teachers in SMP in Sleman regency by conducting technical guidance, workshop, and comparative study in order to improve the professionalism of the teachers comprehensively. The obstacles faced by MGMP PPKn in Sleman regency in improving the professionalism of the teachers included operational fund and time allocation.

Key words: *The roles of MGMP PPKn SMP in Sleman regency, Professionalism, PPKn teachers*

PENDAHULUAN

Guru sebagai tenaga pendidik yang profesional diharapkan tidak hanya memiliki kualifikasi akademik, tetapi juga harus memiliki kompetensi dan sertifikasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang (Daryanto, 2013: 67). Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengamanatkan, profesi guru merupakan bidang pekerjaan

husus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip antara lain memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas, serta memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai bidang tugas mengajar.

Wacana tentang profesionalisme guru kini menjadi isu yang hangat untuk diperbincangkan ke ruang publik, seiring dengan tuntutan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Banyak

kalangan menganggap bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih jauh dari kata memadai, hal ini dikarenakan permasalahan kualitas guru di Indonesia. Jika berkaca pada hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) tahun 2015, pemerintah masih harus menanggung tugas besar untuk mempertajam ujung tombak pendidikan. Pasalnya dari 1,6 juta guru yang mengikuti UKG hanya 192 guru saja yang memperoleh nilai di atas 90,00. Sementara itu, nilai rata-rata nasional hasil UKG tahun 2015 hanya menunjukkan angka sebesar 53,05 nilai rerata tersebut berada di bawah standar kompetensi minimal yang ditetapkan Kemendikbud, yakni sebesar 55,00 (Rizki, 2017: 04).

Berbicara tentang kualitas guru di Indonesia tentunya berhubungan dengan seperangkat kompetensi yang dimiliki guru sebagai tenaga pendidik. Peran guru sebagai tenaga pendidik yang profesional diharuskan memiliki seperangkat kompetensi dalam menjalankan profesinya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Guru dan Dosen, meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Seperangkat kompetensi tersebut sangat penting untuk dimiliki oleh seorang guru dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan, sebab titik berat pembangunan pendidikan terletak pada peningkatan kualitas pendidikan untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan.

Keprofesionalan seorang guru dapat dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat profesi (sertifikasi) dengan syarat telah lulus uji sertifikasi. Tujuan utama guru mengikuti uji sertifikasi yaitu untuk menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah memiliki kompetensi sebagaimana disyaratkan dalam Standar Kompetensi Guru (SKG). Berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan data dan informasi yang peneliti peroleh dari Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman pada tanggal 4 Januari 2018, data terakhir menunjukkan bahwa pada tahun 2018 Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman mencatat guru SMP yang belum memiliki sertifikasi sebanyak 1.040 orang dari jumlah guru sebanyak 2.473. Sedangkan untuk guru

mata pelajaran PPKn SMP terdapat 42 guru dari jumlah guru sebanyak 122 belum memiliki sertifikat profesi (sertifikasi).

Mengacu pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang mensyaratkan tenaga pendidik untuk memiliki kualifikasi akademik minimal. Kualifikasi akademik guru merefleksikan kemampuan yang dipersyaratkan bagi guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik pada jenjang, jenis, dan satuan pendidikan atau mata pelajaran sesuai dengan bidang tugas mengajar (Daryanto, 2013: 67). Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 9 UUGD, kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau diploma empat. Pasal tersebut membawa konsekuensi, guru diharuskan memenuhi standar bawah kualifikasi akademik minimal Strata 1 (S1) atau Diploma IV (DIV).

Berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan data dan informasi yang peneliti dapatkan dari Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, data terakhir menunjukkan bahwa pada tahun 2018 Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman mencatat guru SMP yang belum memiliki kualifikasi akademik minimal pendidikan S1 sebanyak 230 dari jumlah guru sekitar 2.506. Sedangkan untuk guru mata pelajaran PPKn SMP masih terdapat 10 guru yang belum memenuhi standar bawah kualifikasi akademik, bahkan di Kabupaten Sleman masih terdapat guru mata pelajaran PPKn SMP yang hanya memiliki kualifikasi akademik/pendidikan terakhir SLTA.

Selain permasalahan kualifikasi akademik guru yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang serta masih adanya tenaga pendidik yang belum memiliki sertifikasi profesi (sertifikasi) khususnya pada guru mata pelajaran PPKn SMP di Kabupaten Sleman. Permasalahan lain yang berkaitan dengan profesionalisme guru di Kabupaten Sleman yaitu permasalahan latar belakang pendidikan guru yang tidak sesuai dengan bidang tugas mengajar. Pada tahun 2018,

Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman mencatat terdapat 28 guru dari 122 guru mata pelajaran PPKn SMP yang memiliki latar belakang pendidikan yang tidak sesuai dengan bidang tugas mengajar.

Fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa profesionalisme guru mata PPKn SMP di Kabupaten Sleman dapat dikatakan masih belum maksimal. Kenyataan tersebut diperkuat lagi dengan fakta di lapangan yang peneliti peroleh dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, pada tahun 2015 tercatat sedikitnya 5 dari 114 guru mata pelajaran PPKn SMP belum mencapai Kriteria Capaian Minimal (KCM) UKG. Berdasarkan permasalahan yang berkaitan dengan kualitas guru di atas, terutama terkait dengan permasalahan profesionalisme guru, maka diperlukan adanya upaya peningkatan kualitas guru khususnya pada aspek profesionalisme. Peningkatan kualitas guru terutama peningkatan profesionalisme guru dalam rangka peningkatan citra baik guru di Indonesia dapat dilakukan melalui pemberdayaan lembaga-lembaga peningkatan profesionalisme guru seperti mengoptimalkan peran forum kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) (Rian Anggara, 2012: 188).

Rimaulina Listian Fithaloka dalam penelitiannya yang berjudul “*Peranan Kinerja MGMP PKN dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru SMP (Studi Kasus terhadap Guru SMP di Kabupaten Kuningan)*” mengungkapkan bahwa dalam upaya peningkatan kompetensi profesionalisme guru PKN di Kabupaten Kuningan diperlukan peran dari MGMP PKN, diantaranya sebagai wahana pembelajaran PKN bagi para guru serta sebagai fasilitator program pelatihan dan pengembangan profesi. Adapun peran tersebut perlu dioptimalkan dengan harapan agar tercipta peningkatan profesionalisme guru melalui berbagai upaya, yaitu pengoptimalan kegiatan MGMP PKN yang disesuaikan dengan kebutuhan guru dan siswa di lapangan meliputi pembuatan perangkat pembelajaran, pendalaman materi, serta pembuatan soal, dan sebagainya yang sangat membantu guru dalam memecahkan permasalahan dan kesulitan yang dihadapi

selama melaksanakan tugas pokoknya sebagai guru di sekolah; pembinaan profesionalisme guru secara berkelanjutan seperti diadakannya *workshop* pengembangan kompetensi guru, seminar, studi banding, *best practice*, *riil teaching*, *peer teaching*, penulisan karya ilmiah, dan PTK; pemberian motivasi tentang arti penting peningkatan profesionalisme guna meningkatkan kompetensi guru bagi peningkatan kualitas kinerja sebagai guru yang profesional (Rimaulina, 2013: 112-114).

Menindaklanjuti hasil observasi pra penelitian dan beberapa penelitian yang relevan tentang peranan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dalam meningkatkan kompetensi profesionalisme guru pada mata pelajaran PPKn di beberapa wilayah, maka peneliti memilih Kabupaten Sleman sebagai lokasi penelitian untuk mengetahui peran Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dalam meningkatkan profesionalisme guru mata pelajaran PPKn SMP di wilayah Kabupaten Sleman.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Bogdan dan Guba (Suharsaputra, 2014:181) mendeskripsikan penelitian kualitatif atau *naturalistic inquiry* sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan kata-kata tertulis maupun lisan dari narasumber beserta perilaku yang dapat diamati oleh peneliti. Penelitian deskriptif (*descriptive research*) merupakan penelitian yang berusaha mengungkapkan suatu permasalahan atau fakta (*fact finding*) dan disertai interpretasi yang menggambarkan berbagai kondisi/situasi, dan gejala serta menjawab berbagai pertanyaan yang berhubungan dengan subjek penelitian (Wiratha, 2006: 154).

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian deskriptif-kualitatif tepat digunakan untuk mengetahui secara mendalam peran MGMP PPKn SMP Kabupaten Sleman dalam peningkatan profesionalisme guru PPKn SMP di Kabupaten Sleman. Penggunaan penelitian

deskriptif-kualitatif tepat untuk menggali data baik dari segi upaya yang dilakukan beserta kendala yang dihadapi MGMP PPKn SMP Kabupaten Sleman dalam peningkatan profesionalisme guru PPKn SMP di Kabupaten Sleman.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lingkungan Sekolah Menengah Pertama (SMP) baik negeri maupun swasta yang mana merupakan tempat pengurus dan anggota MGMP PPKn SMP Kabupaten Sleman menjalankan tugasnya sebagai seorang pendidik. Adapun dasar pertimbangan penentuan lokasi penelitian di Kabupaten Sleman karena peneliti telah lebih dahulu memperoleh data dan informasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman terkait dengan permasalahan profesionalisme guru PPKn SMP di Kabupaten Sleman. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan Juni 2018.

Subjek Penelitian

Penentuan subjek penelitian oleh peneliti dilakukan berdasarkan kelayakan pengetahuan mereka terhadap obyek penelitian yang ditentukan berdasarkan kebutuhan dan ditunjuk secara *purposive* (Bungin, 2001: 208). Penentuan subjek penelitian dengan teknik *purposive* yaitu penentuan subjek penelitian didasarkan pada pertimbangan dan tujuan tertentu, sehingga tidak dapat dilakukan secara acak.

Dasar pertimbangan yang digunakan oleh peneliti untuk menentukan kriteria subjek penelitian adalah mereka yang mempunyai pengetahuan, pengalaman, dan berkompoten serta dapat memberikan informasi yang diperlukan sehubungan dengan peran MGMP dalam peningkatan profesionalisme guru PPKn SMP di Kabupaten Sleman. Pada penelitian ini, penentuan subjek penelitian sebanyak 7 guru dilakukan dengan memperhatikan kriteria-kriteria tertentu. Adapun kriteria yang dimaksud antara lain sebagai berikut.

1. Guru PPKn jenjang pendidikan SMP pengurus/anggota MGMP Kabupaten Sleman.
2. Guru yang telah mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun.

3. Guru lulusan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK).
4. Guru yang memiliki latar belakang pendidikan sesuai bidang tugas mengajar mata pelajaran PPKn.
5. Guru yang telah memiliki sertifikat profesi (sertifikasi).
6. Guru yang telah lulus Uji Kompetensi Guru (UKG).

Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, berupa teknik wawancara dan dokumentasi. Sedangkan, instrumen pengumpulan data pada penelitian ini adalah kisi-kisi wawancara dan pedoman wawancara. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara menggunakan panduan atau petunjuk wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan dalam proses wawancara dengan tujuan memperoleh data dan informasi terkait dengan masalah penelitian. Wawancara juga disebut salah satu teknik untuk mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan panduan wawancara yang berisi butir-butir pertanyaan untuk diajukan kepada informan (Wiratha, 2006: 176).

Dalam penelitian ini teknik wawancara yang digunakan bersifat semi-terstruktur, wawancara semi terstruktur merupakan teknik wawancara dengan pertanyaan terbuka, sehingga peneliti memiliki kebebasan mengemukakan pertanyaan dan mengatur alur/setting wawancara begitu pun subjek penelitian dapat mengemukakan secara bebas jawaban apa pun sepanjang tidak keluar dari pokok permasalahan yang diteliti. Pedoman wawancara (*guideline*) diperlukan dalam wawancara semi-terstruktur sebagai pedoman dalam membuat pertanyaan wawancara (kontrol penggalan data), berisi topik pembicaraan yang akan digali dan diungkap peneliti dengan mengacu pada tema sentral dan di sesuaikan dengan tujuan wawancara (Hardiansyah, 2013: 63-71).

Wawancara dengan bentuk semi-terstruktur dilakukan peneliti untuk mengetahui dan menggali informasi tentang peran MGMP PPKn SMP

Kabupaten Sleman dalam peningkatan profesionalisme guru PPKn SMP di Kabupaten Sleman. Tujuan dilakukannya wawancara semi-terstruktur dalam penelitian ini, yaitu untuk memperoleh data dan informasi dari subjek penelitian tentang peran dan upaya yang dilakukan beserta kendala yang dihadapi MGMP PPKn SMP Kabupaten Sleman dalam meningkatkan profesionalisme guru PPKn SMP Di Kabupaten Sleman.

Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting berhubungan dengan masalah yang diteliti. Teknik dokumentasi dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan sebagai pendukung dan pelengkap dari penggunaan teknik wawancara (data primer) tanpa mengganggu obyek penelitian. Dalam melaksanakan penelitian, teknik pengumpulan data dengan metode studi dokumentasi dilakukan oleh peneliti dengan menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan lain sebagainya yang dihimpun dan dipilih sesuai dengan fokus permasalahan penelitian (Wirartha, 2006: 230). Dalam penelitian ini, penggunaan teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data berupa dokumen program kerja MGMP, dokumen AD/ART MGMP, dan dokumen foto yang digunakan sebagai data pendukung hasil wawancara dan sebagai dokumen tertulis.

Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam menentukan keabsahan/validitas data, peneliti menggunakan teknik pemeriksaan *cross check* data. Teknik pemeriksaan data dengan menggunakan *cross check* dilakukan dengan strategi pengumpulan data ganda pada obyek penelitian yang sama (Bungin, 2001: 95-96). *Cross check* data dilakukan dengan mengecek data hasil wawancara dengan data dokumentasi. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur, agar data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan

keabsahannya, maka hasil wawancara dari subjek penelitian di *cross check* dengan subjek penelitian yang lain kemudian *dicheck* dengan dokumentasi yang berkaitan.

Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif dengan model interaktif Miles dan Huberman. Dalam memproses analisis data model Miles dan Huberman (Ghoni, 2014: 307-309) dapat melalui tiga tahap berikut,.: (1) Reduksi Data; (2) Penyajian Data; (3) Penarikan Kesimpulan/Verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran MGMP dalam Peningkatan Profesionalisme Guru PPKn SMP di Kabupaten Sleman

Herbert Blumer menggambarkan peran sebagai sebuah interaksi simbolik yang ditandai dengan hubungan yang diciptakan antar individu di dalam masyarakat (Wirawan, 2013: 119). Peran MGMP PPKn SMP dalam peningkatan profesionalisme guru PPKn SMP di Kabupaten Sleman dihasilkan dari adanya proses interaksi simbolik diantara *stakeholder* dalam hal ini pengurus dan anggota MGMP, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga serta MKKS di dalam forum MGMP PPKn SMP Kabupaten Sleman yang membentuk suatu struktur sosial yang bernama organisasi/forum MGMP PPKn SMP Kabupaten Sleman. Peran MGMP PPKn SMP dalam peningkatan profesionalisme guru PPKn SMP di Kabupaten Sleman diciptakan melalui program kerja dan serangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh MGMP PPKn SMP Kabupaten Sleman sebagai upaya peningkatan profesionalisme guru PPKn SMP di Kabupaten Sleman.

Peran yang dilakukan MGMP PPKn SMP Kabupaten Sleman dalam peningkatan profesionalisme guru PPKn SMP di Kabupaten Sleman yaitu memfasilitasi guru mata pelajaran PPKn SMP di Kabupaten Sleman dengan cara menyelenggarakan berbagai macam program kerja sebagai upaya peningkatan

profesionalisme guru PPKn di Kabupaten Sleman.

Menurut buku Pedoman Penyelenggaraan MGMP (Depdikbud, 1998: 9-10) peran MGMP yaitu mengakomodasi aspirasi "...dari, oleh, dan untuk.." anggota MGMP. Hal tersebut sejalan dengan fakta yang ditemukan peneliti di lapangan bahwa MGMP PPKn SMP Kabupaten Sleman sebagai forum bernaungnya guru-guru mata pelajaran PPKn SMP di Kabupaten Sleman memiliki peran untuk memfasilitasi dengan mengkoordinasikan kegiatan dan mengakomodasikan aspirasi serta keinginan guru yang sekiranya dapat mendukung dalam peningkatan profesionalismenya. Sedangkan secara lebih khusus peran yang dilakukan MGMP dalam peningkatan profesionalisme guru PPKn SMP di Kabupaten Sleman yaitu sebagai wadah pembentukan karakter guru yang memiliki profesionalisme secara komprehensif yang diwujudkan secara nyata dalam lima bentuk kerja sebagai berikut (Mudlofir, 2013: 31-34).

1. Keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang mendekati standar ideal.
2. Meningkatkan dan memelihara citra profesi.
3. Memanfaatkan setiap kesempatan pengembangan profesional.
4. Mengejar kualitas dan cita-cita dalam profesi.
5. Memiliki kebanggaan terhadap profesinya.

B. Upaya MGMP dalam Peningkatan Profesionalisme Guru PPKn SMP di Kabupaten Sleman

Menurut Panduan Penyelenggaraan MGMP (Depdikbud, 1998: 11) dalam upaya peningkatan profesionalisme guru mata pelajaran MGMP memiliki berbagai jenis kegiatan yang dapat diikuti oleh guru mata pelajaran yang memiliki rumpun mata pelajaran yang sejenis, dapat dikategorikan menjadi tiga jenis kegiatan yakni kegiatan pengembangan kemampuan dan keterampilan guru, kegiatan perluasan wawasan guru, dan kegiatan penunjang. MGMP PPKn SMP Kabupaten Sleman dalam upaya peningkatan profesionalisme guru PPKn SMP Kabupaten Sleman memiliki beberapa program kerja yang

dikategorikan ke dalam dua jenis yakni utama dan penunjang dalam bentuk kegiatan bimbingan teknis, seminar/*workshop*, dan studi banding.

Upaya peningkatan profesionalisme guru secara teknis dan operasional dapat ditempuh melalui kegiatan-kegiatan seperti pelatihan, diskusi masalah-masalah pendidikan, penelitian, penulisan buku ajar, pembuatan media pembelajaran dengan model seminar maupun *workshop* (Mudlofir, 2012: 134-137). MGMP PPKn SMP Kabupaten Sleman dalam upaya peningkatan profesionalisme guru PPKn SMP Kabupaten Sleman secara teknis dan operasional dilakukan melalui berbagai macam program kerja sebagai berikut.

1. Program Utama:

- a. Diskusi permasalahan pembelajaran;
- b. Pendalaman materi PPKn;
- c. Pengembangan Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP);
- d. Pemantapan Kurikulum 2013;
- e. Penyusunan Buku Pendamping PPKn;
- f. *Workshop* Penyusunan Perangkat Pembelajaran PPKn;
- g. Sosialisasi dan Informasi Guru Pembelajar PPKn;
- h. *Workshop* Pengembangan Karir Guru;
- i. Penyusunan Kisi-kisi dan Soal Ujian Sekolah;
- j. Penyusunan Kisi-kisi dan Soal Penilaian TKM/PAS.

2. Program Penunjang:

- a. Kunjungan ke Lembaga-Lembaga Negara
- b. *Workshop* Media Pembelajaran Berbasis IT
- c. *Workshop* Penulisan Karya Ilmiah

C. Kendala MGMP dalam Peningkatan Profesionalisme Guru PPKn SMP di Kabupaten Sleman

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan MGMP sebagai upaya peningkatan profesionalisme guru PPKn SMP di Kabupaten Sleman, meliputi.

- a. Dana Operasional Kegiatan MGMP PPKn SMP Kabupaten Sleman
MGMP PPKn SMP Kabupaten Sleman hanya mengandalkan swadaya/kontribusi anggota dan subsidi

Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Dana operasional kegiatan MGMP PPKn SMP Kabupaten Sleman yang diperoleh dari swadaya/kontribusi mandiri anggota merupakan dana dalam bentuk swadaya/kontribusi mandiri peserta yang mengikuti kegiatan yang diadakan oleh MGMP PPKn SMP Kabupaten Sleman, diwajibkan membayar iuran sebesar Rp 100.000,00 untuk 3-4 kali pertemuan. Selanjutnya dana swadaya/kontribusi peserta dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan seperti pengadaan konsumsi, sertifikat, honor pemateri/narasumber, modul maupun perangkat pembelajaran berupa RPP.

Selain sumber dana dari swadaya/kontribusi peserta, MGMP PPKn SMP Kabupaten Sleman memperoleh sumber dana dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman yang dapat dicairkan 2 kali dalam 1 semester untuk mendanai setiap kegiatan yang dilaksanakan, tetapi pendanaan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman sifatnya tidak menentu. Dana operasional kegiatan MGMP PPKn SMP Kabupaten Sleman yang berasal dari swadaya/kontribusi peserta dan subsidi Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman ternyata kurang cukup untuk mendanai setiap program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan. Hal tersebut yang mendorong MGMP PPKn SMP Kabupaten Sleman mencari sumber dana lain dengan bekerjasama dengan pihak sponsor/penerbit untuk mengambil keuntungan dari penjualan buku pendamping, guna menjaga eksistensi MGMP PPKn SMP Kabupaten Sleman dalam peningkatan profesionalisme guru PPKn.

b. Waktu

Jam mengajar guru mata pelajaran PPKn SMP di Kabupaten Sleman yang rata-rata 36 jam per minggu menyebabkan kebanyakan guru PPKn SMP di Kabupaten Sleman tidak memiliki banyak waktu untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dilaksanakan MGMP PPKn SMP Kabupaten Sleman. Hal inilah yang menjadi salah satu kendala guru mata pelajaran PPKn SMP Kabupaten Sleman dalam mengikuti kegiatan di dalam forum MGMP PPKn SMP Kabupaten Sleman.

Kendala lain adalah jadwal mengajar guru mata pelajaran PPKn SMP di Kabupaten Sleman yang berbenturan dengan jadwal pelaksanaan kegiatan MGMP PPKn SMP Kabupaten Sleman dan jadwal pelaksanaan kegiatan di masing-masing sekolah. Hal tersebut yang mengharuskan pengurus dan anggota MGMP mencari solusi bagi guru untuk tetap dapat meningkatkan profesionalismenya dengan *melobby* pihak kurikulum untuk membuat jadwal pelajaran dengan disesuaikan dengan hari MGMP setiap mata pelajaran di sekolah., meninggalkan KBM dengan memberikan tugas kepada peserta didik dengan seizin Kepala Sekolah atau menukar jadwal mengajar dengan guru mata pelajaran yang lain.

D. Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) sebagai Kelompok Kepentingan (*Interest Group*)

Realitas kegiatan kependidikan dapat berwujud organisasi atau kegiatan sekelompok manusia sebagai suatu sistem yang bersifat tetap (Nawawi, 1982: 8). Kegiatan kependidikan semacam itu dapat diwujudkan di dalam bentuk organisasi atau forum yang diselenggarakan melalui kegiatan kependidikan secara non-formal. Kegiatan kependidikan di lingkungan organisasi seperti Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) bersifat melembaga karena diselenggarakan sebagai usaha meningkatkan profesionalisme guru guna mengarahkan peserta didik untuk mencapai kedewasaannya.

MGMP sebagai unit dalam masyarakat yang berbentuk persekutuan antar kelompok orang mempunyai kepentingan (*interest*) dalam meningkatkan profesionalisme guru guna menunjang kemampuannya dalam mendidik peserta didik yang belum dewasa. Di samping itu MGMP bukan sekedar persekutuan guru mata pelajaran yang sejenis akan tetapi juga merupakan kelompok yang terbentuk berdasarkan kebutuhan yang ada pada diri masing-masing pendidik khususnya kebutuhan untuk terus meningkatkan profesionalismenya secara berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam organisasi MGMP berkembang minat /kepentingan kelompok (*interestgroup*) yang sama berupa

kebutuhan untuk selalu meningkatkan profesionalisme dalam diri masing-masing pendidik guna mempersiapkan peserta didik agar dapat hidup yang layak dalam masyarakat yang semakin maju/modern dan kompleks.

MGMP PPKn SMP Kabupaten Sleman merupakan kelompok kepentingan (*Interest Group*) bagi guru dalam rangka menuntut berbagai kebijakan pendidikan dan kesejahteraan guru khususnya dalam menuntut pemenuhan hak guru untuk terus meningkatkan profesionalismenya secara berkelanjutan. Peran sebagai kelompok kepentingan ini terjadi manakala MGMP PPKn SMP Kabupaten Sleman dalam menyampaikan segala aspirasinya kepada pemerintah dilakukan dengan cara-cara yang santun seperti melakukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman sebagai mitra dalam meningkatkan profesionalisme guru guna meningkatkan mutu pendidikan secara nasional.

Upaya dalam memperoleh subsidi Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, MGMP PPKn SMP Kabupaten Sleman melakukan pengajuan proposal kegiatan dan laporan kegiatan sebagai bentuk penyampaian aspirasi guru agar memperoleh subsidi Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman yang digunakan sebagai dana operasional kegiatan guna pemenuhan hak tenaga pendidik khususnya dalam meningkatkan profesionalisme guru PPKn SMP Kabupaten. Setiap menyampaikan aspirasi ke pemerintah, MGMP PPKn SMP Kabupaten Sleman mengutamakan jalur birokrasi dan kerjasama khususnya dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman sebagai upaya peningkatan profesionalisme guru dan peningkatan kualitas pendidikan secara nasional.

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil beberapa simpulan sebagai berikut.

1. Peran MGMP PPKn SMP Kabupaten Sleman sebagai wadah peningkatan profesionalisme guru yang memfasilitasi dengan

mengkoordinasikan kegiatan dan mengakomodasi aspirasi serta keinginan guru mata pelajaran PPKn SMP di Kabupaten Sleman dalam rangka mendukung upaya pembentukan karakter guru sebagai tenaga pendidik yang memiliki profesionalisme secara komprehensif.

2. MGMP PPKn SMP Kabupaten Sleman merupakan wadah peningkatan profesionalisme guru PPKn SMP Kabupaten Sleman yang memiliki program kerja utama dan penunjang dalam bentuk bimbingan teknis, seminar/*workshop*, dan studi banding sebagai upaya peningkatan profesionalisme guru secara komprehensif.
3. Kendala yang dihadapi MGMP PPKn SMP Kabupaten Sleman dalam peningkatan profesionalisme guru PPKn SMP Kabupaten Sleman yaitu kendala pada dana operasional kegiatan yang disebabkan karena MGMP PPKn SMP Kabupaten Sleman hanya mengandalkan swadaya/kontribusi mandiri peserta dan subsidi Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman yang sifatnya tidak menentu untuk mendanai setiap kegiatan yang diselenggarakan. Solusi dari kendala tersebut di atas, MGMP PPKn SMP Kabupaten Sleman mencari sumber dana lain dengan bekerjasama dengan penerbit untuk mengambil keuntungan dari penjualan buku pendamping. Selanjutnya, kendala waktu pelaksanaan kegiatan MGMP PPKn SMP Kabupaten Sleman yang berbenturan dengan jadwal mengajar guru dan pelaksanaan kegiatan di masing-masing sekolah. Hal tersebut yang mengharuskan guru PPKn SMP Kabupaten Sleman mencari jalan keluar dengan *me-lobby* pihak kurikulum untuk membuat jadwal pelajaran yang disesuaikan dengan hari MGMP PPKn SMP Kabupaten Sleman, meninggalkan KBM dengan memberikan tugas kepada peserta didik dengan seizin Kepala Sekolah atau menukar jadwal mengajar dengan guru mata pelajaran lain.

B. Saran

Berdasarkan simpulan sebagaimana diuraikan di atas, maka terdapat beberapa saran yang diajukan peneliti sebagai berikut.

1. MGMP PPKn SMP Kabupaten Sleman

MGMP PPKn SMP Kabupaten Sleman diharapkan untuk lebih meningkatkan manajemen dan kerjasama antara pihak-pihak terkait terutama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman guna menjaga dan mempertahankan eksistensi MGMP PPKn SMP Kabupaten Sleman, menyusun program kerja dan kegiatan yang dituangkan dalam bentuk matriks dan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun sebagai upaya peningkatan profesionalisme guru, serta menyusun AD/ART sesuai yang dibutuhkan.

2. Guru PPKn SMP Kabupaten Sleman

Diharapkan guru PPKn SMP Kabupaten Sleman dapat merubah *mainset* tujuan tergabung dalam forum MGMP PPKn SMP Kabupaten Sleman, tidak hanya sekedar sebagai wadah untuk memperoleh sertifikat guna pengembangan karir dan sertifikasi tetapi sebagai wadah peningkatan profesionalisme guru. Guru mata pelajaran PPKn SMP Kabupaten Sleman dapat menjadikan MGMP PPKn SMP Kabupaten Sleman sebagai wadah peningkatan profesionalisme guru dengan cara selalu berpartisipasi aktif pada setiap program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan MGMP PPKn SMP Kabupaten Sleman agar guru PPKn SMP Kabupaten Sleman memiliki profesionalisme yang tinggi sehingga dapat menunjang tercapainya tujuan pendidikan nasional.

3. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman diharapkan untuk lebih meningkatkan subsidi dana operasional kegiatan bagi MGMP PPKn SMP Kabupaten Sleman dengan cara menganggarkan

secara rutin anggaran dana untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam forum MGMP PPKn SMP Kabupaten Sleman.. Selain itu diharapkan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman dapat lebih meningkatkan proses seleksi pendaftaran guru PPKn SMP Kabupaten Sleman dengan melihat latar belakang guru yang sesuai dengan bidang tugas mengajar PPKn.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Rian. (2012). Penerapan Lesson Study berbasis MGMP terhadap Peningkatan Profesionalisme Guru PPKn SMP Se-Kabupaten Ogan Ilir. *Jurnal Forum Sosial*. Volume V, Nomor 02.
- Bugin, Burhan. (2001). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta; Raja Grafindo Persada.
- Danim, Sudarwan. (2010). *Profesionalisasi dan Etika Profesi Guru*. Bandung: Alfabeta.
- Ghoni, Djunaidi dan Fauzan Alamanshur. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Herdiansyah, Haris. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Mudlofir, Ali. (2012). *Pendidik Profesional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rimaulina Listian Fithaloka. (2013). *Peranan Kinerja MGMP PPKn dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru SMP*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Rizki, Ardian Nur. (2017). *Jalan Terjal Profesionalisme Guru*. http://krjogja.com/web/news/read/26165/Jalan_Terjal_Profesionalisme_Guru diakses 3 Januari 2018 pukul 20: 49.
- Suharsaputra, Uhar. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*. Bandung: Refika Aditama.
- Wirawan, 2013. *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*. Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama.

